



Risalah Kebijakan

• • • • Nomor 8, Oktober 2023



Optimalisasi Program Buku Bacaan Bermutu untuk Penguatan Literasi Indonesia



Ringkasan

- Dalam rangka peningkatan kemampuan literasi secara merata di Indonesia, Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan program bertajuk Program Buku Bacaan bermutu untuk Literasi Indonesia. Program ini menyasar satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau yang memiliki hasil AN dengan kompetensi literasi masih rendah.
- Setelah 1 tahun implementasi, program ini membuat koleksi buku bacaan sekolah bukan hanya bertambah, namun juga terbukti lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa sesuai jenjang kemampuan. Akan tetapi, beberapa temuan evaluasi dapat menjadi bahan refleksi untuk perbaikan program, yaitu: (1) sebagian koleksi buku bacaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan kenyamanan membaca siswa; (2) sebagian guru masih mengalami kesulitan memahami label perjenjangan buku; (3) terdapat sejumlah satuan pendidikan penerima buku yang belum terpapar adanya program; (4) kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola dan memanfaatkan buku belum merata.
- Berdasarkan berbagai temuan lapangan tersebut, risalah kebijakan ini merekomendasikan optimalisasi Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia melalui penguatan kurasi buku bacaan bermutu agar lebih kontekstual, pelabelan perjenjangan buku yang lebih sederhana, penguatan kolaborasi dengan dinas pendidikan, serta penguatan pemahaman kepala sekolah dan guru

Konteks

Menumbuhkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi menjadi salah satu prioritas penting bagi pendidikan di Indonesia. Seperti diketahui, hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) untuk kemampuan membaca anak Indonesia usia 15 tahun tergolong rendah. Di Indonesia, 30% peserta didik di usia tersebut mencapai setidaknya level 2 kemampuan membaca, yakni mampu mengidentifikasi gagasan utama dari teks yang cukup panjang, mencari informasi berdasarkan kriteria yang eksplisit, dan merefleksikan tujuan dan bentuk teks jika diminta secara eksplisit untuk melakukannya (OECD, 2018). Capaian ini lebih rendah dari rata-rata negara OECD yang mencapai 77%. Hasil asesmen nasional tahun 2021 juga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Diketahui satu dari dua peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi (Kemendikbudristek, 2023).

Permasalahan literasi di Indonesia tidak hanya terkait rendahnya kemampuan literasi, tetapi juga terkait kesenjangan kemampuan literasi antardaerah. Berdasarkan analisis data Asesmen Nasional (AN) 2022, pencapaian kompetensi minimum literasi pada tingkat sekolah dasar (SD) di daerah tertinggal menunjukkan 89,83% berada di bawah kompetensi minimum dan hanya 10,17% yang sudah mencapai kompetensi minimum (PSKP, 2023).

Dalam rangka menumbuhkan kegemaran membaca dan mendukung peningkatan kemampuan literasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) telah menyalurkan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu di tahun 2022. Bertajuk “Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia”, program ini menyasar sekolah pada jenjang PAUD dan SD yang berlokasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau yang memiliki kompetensi minimum AN pada aspek literasi rendah, yaitu berada pada kategori 1 dan 2. Program ini memiliki tiga pilar utama, yakni: 1) pemilihan dan perjenjangan buku bacaan bermutu, 2) pencetakan dan distribusi, dan 3) pelatihan dan pendampingan.

Satu tahun setelah program hibah buku dilakukan, tim Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) melakukan kajian untuk melihat proses implementasi program di lapangan, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan untuk implementasi program selanjutnya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran berupa survei yang diisi oleh 6.067 guru, 4.435 kepala sekolah, dan 1.590 petugas perpustakaan yang bertugas di satuan pendidikan PAUD dan SD yang menjadi target sasaran penerima buku hibah, serta wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan di 3 satuan PAUD dan 16 satuan SD penerima hibah buku. Selain itu, dilakukan pula kajian pustaka untuk mengetahui praktik-praktik kebijakan serupa di berbagai negara sebagai perbandingan dan bahan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan hibah buku yang sedang dikaji.

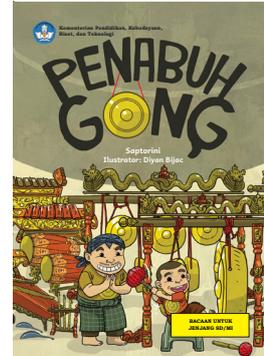
Temuan #1: Sebagian koleksi buku bacaan yang terdapat di satuan pendidikan masih belum sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan peserta didik dalam membaca.

Buku merupakan salah satu input penting dalam kegiatan belajar mengajar. Ketersediaan buku dapat membantu memfasilitasi peserta didik untuk belajar di dalam dan luar kelas serta membantu guru dalam memberikan pekerjaan rumah, seperti yang dijelaskan Paschal, Weinstein, dan Walberg, (dalam Holden (2016). Akan tetapi, dari survei yang diisi oleh 1.590 petugas perpustakaan, 19% responden menyatakan bahwa jenis buku yang paling banyak terdapat di perpustakaan sekolah tempat mereka bekerja adalah buku yang tidak sesuai dengan usia peserta didik sekolah dasar, seperti buku keterampilan berwirausaha.

Oleh karena itu, penting untuk memperkaya buku-buku yang dimiliki sekolah agar lebih sesuai dengan usia, minat, dan kemampuan peserta didik. Hal ini juga sejalan dengan hasil studi dari program penyediaan buku di Kenya (Glewwe, P., Kremer, M., & Moulin, S, 2009) dan kelompok membaca di Amerika (Kim & Guryan, 2010) yang menunjukkan bahwa program tersebut tidak

berdampak terhadap hasil pembelajaran karena buku yang digunakan kurang sesuai dengan usia dan kompetensi peserta didik. Manfaat buku hanya dirasakan oleh peserta didik yang memiliki tingkat kompetensi tinggi, dikarenakan banyak peserta didik yang menjadi target sasaran program belum mencapai level kompetensi untuk memahami isi buku yang diberikan.

Sejauh ini, terdapat 716 judul buku yang telah memenuhi kriteria buku bacaan bermutu dari Kemendikbudristek. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghadirkan buku bacaan yang menarik untuk dibaca, berkorelasi dengan keseharian anak, serta memenuhi kaidah perjenjangan buku bacaan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas buku-buku yang dibagikan. Sebagai contoh, terdapat buku yang menggunakan jenis huruf yang sulit untuk dipahami pembaca dini sebagaimana terlihat pada kata “penabuh” dan “gong” pada Gambar 1. Selain itu, buku-buku yang muatannya mengandung konsep atau budaya baru, belum seluruhnya memiliki catatan atau glosarium. Padahal, catatan atau glosarium ini akan sangat bermanfaat untuk guru dan peserta didik dalam memahami makna dari kosakata yang berasal dari konsep atau budaya baru. Temuan lain juga tampak pada buku yang berjudul “Surat dari Kobror”. Dalam judul tersebut, kata Kobror yang merupakan nama sebuah pulau, tidak mudah dilafalkan oleh siswa pembaca dini dan pembaca awal.



Gambar 1 Contoh Buku Bacaan Siswa

Temuan #2: Pelabelan buku berjenjang yang tidak konsisten dan kurang intuitif menyebabkan guru kesulitan mencari buku bacaan yang sesuai untuk peserta didik.

Kondisi sampul buku bacaan bermutu cukup beragam, khususnya dalam konteks pelabelan perjenjangan buku pada halaman sampul buku. Terdapat dua permasalahan terkait label buku tersebut. *Pertama*, pelabelan buku tidak konsisten. Sebagian buku ada yang sudah memiliki label, namun ada pula yang tidak. Selain itu, secara umum terdapat tiga pola label buku. Ada yang menggunakan huruf A, B1, B2, B3, dan C sesuai kaidah (standar) buku berjenjang dari Kemendikbudristek, namun ada pula label berupa angka 1, 2, 3, dan label berupa simbol hewan, seperti kumbang, gajah, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi ini menyebabkan guru kurang memahami makna label tersebut. Padahal, label A, B1, B2 dan B3 serta C merupakan label perjenjangan buku untuk menunjukkan level kemampuan membaca siswa sesuai buku panduan perjenjangan. Label A merupakan simbol bagi pembaca dini, B1 untuk pembaca awal jenjang B1, B2 untuk pembaca awal jenjang B2, dan B3 untuk pembaca awal jenjang B3. Sementara label C untuk pembaca semenjana (jenjang menengah), D untuk pembaca jenjang madya, dan E untuk pembaca mahir.

Jenjang Pembaca	Simbol	Karakteristik	Komponen	Deskripsi	
Pembaca Awal jenjang B3 (Early/Beginning Reader) Simbol Pembaca Awal B3 ditanda dengan lingkaran berwarna ungu dan kode B3.		Panjang dan format Simbol diletakkan di cover depan dengan posisi yang disesuaikan agar mudah dikenali pembaca sasaran.	Panjang dan format a. Maksimal 12 kata per kalimat. b. Maksimal 3 paragraf per halaman (maksimal 3 kalimat per paragraf). c. Tebal 32-48 halaman. d. Font tidak berkait (sanser dengan ukuran minimal pt dan spasi yang memadai). e. Penempatan kalimat dan paragraf di setiap halaman terstruktur dan mudah terbaca (keterbacaan tinggi).	Pembaca Semenjana jenjang C (Intermediate Reader) Simbol Pembaca Semenjana ditandai dengan lingkaran berwarna biru dan kode C. Simbol diletakkan di cover depan dengan posisi yang disesuaikan agar mudah dikenali pembaca sasaran.	Struktur Bahasa a. Maksimal 12 kata per kalimat. b. Maksimal 4 paragraf per halaman (maksimal 5 kalimat per paragraf). c. Menggunakan variasi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. d. Menggunakan variasi penyajian paragraf (naratif, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi) dan bentuk paragraf (deduktif dan induktif).

Gambar 2 Contoh Perbandingan Kriteria Perjenjangan Buku
 Sumber: Pusat Perbukuan, BSKAP (2023)

Kedua, pelabelan kurang informatif bagi guru. Bahkan guru yang sudah mengikuti pelatihan juga masih kesulitan membedakan antara label B1, B2, dan B3 karena perjenjangan yang tidak jelas antarlabel. Misalnya, label B1 dan B2 mirip dan sulit dibedakan, dan label B3 justru hampir setara dengan label C (Gambar 2). Dari Gambar 2 terlihat bahwa deskripsi simbol pada B3 dan C memiliki perbedaan yang tipis. Keduanya sama-sama menyebutkan maksimal 12 kata per kalimat. Perbedaannya hanya pada jumlah paragraf, dengan B3 menyebutkan maksimal 3 paragraf

dalam satu halaman, sementara jenjang C menyebutkan 4 paragraf. Padahal, nyatanya tidak ada buku yang benar-benar dapat memenuhi kriteria tersebut secara hitam-putih. Pelabelan yang terlalu mirip ini alih-alih memudahkan guru, justru menyebabkan kesulitan dalam membedakan level pada jenjang-jenjang tersebut. Di samping itu, untuk guru yang belum mengikuti pelatihan, label tersebut tidak dapat langsung dipahami sebagai label perjenjangan buku yang berkaitan dengan penggunaannya untuk siswa.

Temuan #3: Kurangnya sosialisasi program menyebabkan sebagian sekolah kurang memiliki *ownership* terhadap program.

Lebih dari 20.000 satuan pendidikan yang terdiri dari 5.963 PAUD dan 14.595 SD di kawasan 3T dan daerah dengan nilai kompetensi minimum literasi dan numerasi yang masih rendah ditargetkan menerima hibah buku bacaan bermutu pada tahun 2022 dan 2023. Buku yang seharusnya diterima masing-masing PAUD adalah sejumlah 30 eksemplar. Sementara untuk SD, buku yang seharusnya diterima berkisar antara 1.593 sampai 1.678 eksemplar.

Akan tetapi, hasil survei menunjukkan bahwa sejumlah satuan pendidikan yang menjadi target sasaran merasa belum menerima buku hibah. Dari kepala sekolah yang menjadi responden, 2.106 (47,49%) menyatakan merasa tidak menerima buku hibah di tahun 2022. Angka ini menimbulkan pertanyaan: apakah sekolah benar-benar tidak menerima buku?

Memang terdapat sekolah yang tidak menerima buku karena, seperti yang terjadi di Sabang, terdapat kebijakan dinas pendidikan untuk menukar sekolah sasaran atas dasar pertimbangan sekolah tersebut sudah sering menerima hibah untuk literasi. Sementara itu, sebagian besar sekolah yang merasa tidak menerima buku pada kenyataannya telah menerima dan menandatangani berita acara serah terima. Akan tetapi, karena kurangnya sosialisasi, sebagian mereka tidak mengetahui buku yang diterima merupakan bagian dari program ini. Di Halmahera Utara, misalnya, sekolah merasa tidak menerima buku karena tidak mengetahui bahwa sekolah menjadi sasaran program, padahal buku sudah sampai di sekolah, namun tidak pernah dibuka. Begitu juga di Garut, sejumlah sekolah tampak belum membuka bukunya dengan alasan guru belum sempat mengelola buku-buku tersebut, padahal sudah dua bulan berlalu sejak buku diterima. Hal-hal serupa juga terjadi di tempat lain, seperti di Kabupaten Lombok Utara, Batanghari, Berau, Merauke dan Natuna.

Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian sekolah penerima buku belum memahami apa tujuan pemberian buku, mengapa sekolah tertentu berhak menerima buku, dari siapa buku berasal, dan apa yang harus dilakukan terhadap buku tersebut. Beberapa sekolah mengabaikan buku hibah di tempat yang kurang layak seperti di gudang cat atau di tempat peralatan kebersihan. Sebagian lagi merasa takut membuka buku karena belum mengetahui siapa pengirimnya dan khawatir mendapat konsekuensi harus membayar buku yang tidak pernah mereka pesan.

Temuan #4: Kemampuan perangkat satuan pendidikan untuk mengelola dan memanfaatkan buku bacaan berjenjang belum merata. Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan buku berjenjang.

Penyediaan input seperti buku, laptop, guru, dan gedung merupakan komponen penting dalam mendukung pendidikan terutama untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Program seperti ini juga sangat populer diterapkan karena memiliki output yang terlihat jelas. Hanya saja, program penyediaan input seperti hibah buku bacaan tidak dapat serta-merta meningkatkan hasil belajar jika tidak diiringi dengan perbaikan tentang cara input tersebut digunakan. Penyediaan buku berjenjang akan berdampak lebih besar apabila buku yang telah tersedia didukung dengan penggunaan yang sesuai, seperti pembelajaran yang disesuaikan dengan level kompetensi anak (*teaching at the right level*) atau perbaikan komprehensif dari segi rencana pembelajaran, materi pembelajaran, serta peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan (Panel, 2023).

Pengelolaan buku berjenjang

Sebelum beranjak lebih jauh pada pemanfaatan buku, hal pertama yang perlu dipastikan adalah buku dapat diakses oleh peserta didik melalui kegiatan pengelolaan buku bacaan. Di Sierra Leone (Sabarwal dkk, 2014), program pembagian set buku pelajaran kepada setiap peserta didik sekolah dasar tidak berdampak terhadap peningkatan nilai literasi dan numerasi. Lebih lanjut, diketahui bahwa tidak ada perubahan perilaku peserta didik dalam hal membaca buku di dalam kelas, menggunakan buku untuk membantu pembelajaran di dalam kelas, atau membawa buku ke rumah. Setelah ditelaah, akar penyebab dari tidak berhasilnya program tersebut adalah buku yang diterima hanya disimpan di sekolah, tetapi tidak didistribusikan kepada peserta didik. Kasus serupa ditemukan di sekolah-sekolah yang menjadi penerima hibah buku. Hasil observasi di beberapa sekolah menunjukkan bahwa buku hibah yang diterima hanya disimpan saja tanpa ada kegiatan pengelolaan.

Pengelolaan buku bacaan pada dasarnya dapat dilakukan secara beragam, misalnya dengan memajang buku di perpustakaan atau mengadakan pojok baca, memberi label buku, melakukan rotasi buku, serta menerapkan manajemen peminjaman buku. Meskipun demikian, kemampuan sekolah dalam melakukan pengelolaan buku seperti hal tersebut masih bervariasi. Sebanyak 4.453 guru yang mengisi survei (73,4%) menyatakan memiliki pojok baca di ruang kelasnya. Akan tetapi, 36% dari guru tersebut menyatakan tidak melakukan rotasi buku setidaknya satu bulan sekali. Dalam studi kualitatif, di Sabang dan di Nunukan masih ditemukan pengelolaan buku yang memajang buku dengan punggung buku menghadap ke muka, padahal pemajangan buku idealnya memperlihatkan halaman judul depan (cover) menghadap ke muka. Di Lombok Utara, beberapa buku memang sudah tampak menghadap ke muka, namun sayangnya buku-buku yang dipajang hanya sebagian kecil, selebihnya buku berserakan berada di gudang bercampur dengan buku lain yang sudah tampak rusak.

Belum optimalnya pengelolaan buku bacaan di satuan pendidikan salah satunya ditengarai karena belum adanya kapasitas memadai dalam mengelola buku. Dalam studi kualitatif, sejumlah sekolah tampak belum memahami cara mengelola buku. Pada sekolah yang belum dilatih, hal tersebut tampak wajar, namun sayangnya hal serupa juga masih ditemukan pada sekolah yang sudah dilatih. Misalnya di Lombok Utara, Nunukan, dan Halmahera Utara, guru yang sudah dilatih pada tahun lalu mengaku lupa materi yang diberikan terkait pengelolaan buku. Hal tersebut karena guru belum pernah mengimplementasikan hasil pelatihannya di satuan pendidikan. Padahal, materi pelatihan meliputi pengelolaan buku, pemanfaatan buku berjenjang, serta rotasi dan materi untuk menjaga keberlangsungan program. Namun, pelatihan yang dilakukan selama 3 hari secara luring maupun daring yang diikuti oleh 4.521 guru itu masih kurang optimal hasilnya.

Pemanfaatan buku melalui pembelajaran di dalam dan luar kelas untuk mendukung peningkatan kemampuan literasi

Merujuk pada hasil studi kualitatif, saat ini sudah terdapat sekolah-sekolah yang menerapkan kegiatan pemanfaatan buku bacaan. Sayangnya, aktivitas tersebut umumnya terjadi pada sekolah-sekolah yang didampingi oleh mitra pembangunan. Sekolah yang menerapkan wajib kunjung perpustakaan, membaca bersama, dan membaca berkala adalah sekolah di Nunukan yang merupakan dampingan INOVASI, dan sekolah di Merauke yang merupakan sekolah dampingan dari Yayasan Berkah dan UNICEF. Sementara perilaku tersebut tidak tampak pada sekolah yang hanya dilatih, baik secara daring maupun luring.

Buku juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti untuk memfasilitasi peserta didik belajar secara mandiri, merangkum dan menyampaikan isi bacaan, membaca di rumah, atau digunakan oleh guru untuk membacakan isi buku tersebut di dalam kelas. Namun, saat ini pemanfaatan buku di kelas cenderung lebih tampak pada sekolah yang didampingi oleh mitra pembangunan.

Selain itu, penting juga untuk mengetahui apakah pemanfaatan buku sudah dilakukan

dengan optimal sesuai dengan kaidah dasar yang dianjurkan, terutama untuk mencapai hasil peningkatan literasi. Misalnya, ketika guru melakukan kegiatan membaca nyaring, apakah guru memperlihatkan sampul buku dan menyebutkan identitas buku (judul buku, nama penulis, dan ilustrator), atau apakah guru mengajak siswa menghubungkan cerita yang dibaca dengan diri siswa, atau menghubungkan dengan konsep yang siswa pahami atau dengan bacaan lain (Setiawan, 2022). Pada sekolah yang didampingi secara intensif, sekolah-sekolah tersebut tampak sudah dapat menerapkan dengan baik. Guru tidak hanya paham terkait aktivitas literasi dalam pembelajaran, tetapi juga sudah memahami asesmen diagnostik untuk memberikan buku dengan materi yang tepat sesuai dengan kemampuan siswa.

Rekomendasi Kebijakan

Temuan dari hasil studi yang dilakukan oleh PSKP secara umum menunjukkan bahwa terdapat praktik-praktik implementasi di lapangan yang perlu segera diperbaiki agar tujuan Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia dapat tercapai, yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa langkah yang direkomendasikan PSKP, di antaranya:

1. Penguatan kurasi muatan buku agar lebih kontekstual

Mengingat ditemukannya kasus siswa kesulitan membaca jenis huruf dan memahami isi bacaan buku tertentu, penyelenggara program perlu menguatkan proses kurasi buku hibah. Salah satunya dengan memastikan buku-buku yang dihibahkan menggunakan jenis huruf yang ramah untuk pembaca dini serta mencantumkan glosarium istilah/catatan konteks cerita untuk memudahkan guru dan siswa dalam memanfaatkan buku. Baik judul maupun isi buku harus memperhatikan kaidah penulisan yang jelas dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Standar tersebut juga perlu disosialisasikan dengan baik, agar buku yang berkualitas tidak hanya dapat diterapkan dalam program ini, tetapi seluruh mitra terkait dapat menerbitkan buku anak dengan kualitas serupa.

2. Memberikan label yang lebih sederhana dan informatif untuk memudahkan guru dalam pemanfaatan buku bacaan

Pelabelan buku berjenjang memudahkan guru untuk memahami buku yang sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat membaca secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Untuk memudahkan guru dalam memanfaatkan buku berjenjang, diperlukan tiga hal. *Pertama*, agar guru memilih buku yang tepat, Kemendikbudristek seyogianya dapat memberikan buku yang sudah memuat informasi label dengan konsisten. Untuk itu, di tahun yang akan datang, buku yang dibagikan sudah memuat informasi terkait label sesuai dengan karakteristik konten pada buku berjenjang dengan pola yang konsisten. *Kedua*, label pada buku berjenjang diberikan dengan lebih informatif. Selain memuat informasi label A, B1, B2, B3 dan C, juga ditambahkan informasi peruntukannya, misalnya: A (*untuk pembaca dini*), B (*untuk pembaca awal*) dan seterusnya. *Ketiga*, pelabelan dibuat sederhana dan jelas. Untuk memudahkan guru, definisi pelabelan sebaiknya dibuat sederhana dan jelas serta tidak terlalu teknis. Misalnya untuk tingkat B1 dan B2 dapat dikategorikan sebagai jenjang B (*untuk pembaca awal*), sementara untuk B3 dan C dapat dikategorikan sebagai C (*untuk pembaca semenjana*). Istilah “semenjana” juga bisa diganti dengan “*menengah*” karena istilah tersebut dianggap kurang familier bagi sejumlah guru.

3. Kolaborasi dengan dinas pendidikan untuk memastikan buku hibah tersampaikan dan satuan pendidikan memiliki pemahaman tentang program hibah buku

Dikarenakan terdapat cukup banyak sekolah yang belum menerima program hibah buku, diperlukan beberapa perbaikan dari sisi teknis pengiriman buku. *Pertama*, penyelenggara dapat mengimplementasikan mekanisme konfirmasi dari sekolah yang menjadi sasaran program terkait buku yang diterima. *Kedua*, penyelenggara juga perlu memastikan bahwa satuan pendidikan memiliki pemahaman tentang program hibah buku dan bahwa mereka

menjadi target sasaran penerima hibah buku, sebelum buku dikirimkan. Oleh karena itu, sosialisasi program kepada sekolah penerima bantuan sebaiknya dilaksanakan sebelum buku dikirimkan. *Ketiga*, dalam menentukan sekolah yang menjadi target sasaran, penyelenggara juga perlu berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk menyepakati sekolah yang menjadi target sasaran. Hal ini guna menghindari program bantuan terkonsentrasi di sekolah-sekolah tertentu saja. *Keempat*, Kemendikbudristek dapat mengoptimalkan UPT terkait (seperti BPMP, BBPMP, BGP, BBGP dan Balai Bahasa) untuk memperkuat program, baik dalam hal sosialisasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan, maupun dalam hal menjembatani sekolah untuk memastikan kesesuaian jumlah buku atau pun keluhan lain yang terkait dengan program, sehingga permasalahan yang timbul dapat dieskalasi ke tingkat pusat dan memungkinkan sekolah untuk mendapat solusi yang lebih cepat.

4. Penguatan pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan buku untuk memastikan keberlangsungan program dan ketercapaian tujuan program

Dalam hal kurangnya pemahaman dan kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola dan memanfaatkan buku bacaan, penyelenggara dapat menyertakan panduan, baik dalam bentuk infografis maupun buku saku pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan. Panduan ini dapat disampaikan kepada satuan pendidikan yang sudah menerima buku hibah di tahun 2022 maupun saat melakukan distribusi dan sosialisasi buku hibah di periode selanjutnya.

Selain itu, pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan buku juga perlu ditingkatkan dari segi jumlah guru dan sekolah atau target sasaran pelatihan, serta dari segi metode penyampaian pelatihan. Seperti diketahui, kurang dari 40% responden telah mengikuti pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan buku. Dari jumlah tersebut, sangat sedikit responden yang telah memahami konsep pengelolaan buku berjenjang. Rendahnya pemahaman implementasi pemanfaatan buku dikarenakan guru belum mengimplementasikannya di sekolah, sehingga sejumlah materi yang diajarkan sulit diingat kembali. Untuk itu, selain meningkatkan target pelatihan, kepala sekolah harus menjadi target sasaran yang dilatih agar hasil pelatihan dapat langsung menjadi kebijakan sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki daya untuk menjadi motor penggerak guru di satuan pendidikan dalam penerapan program literasi di sekolah. Dalam hal materi perjenjangan buku, di Kota Sabang misalnya, kepala sekolah yang sudah dilatih cenderung lebih dapat mengimbaskan materi hasil pelatihan ke seluruh guru daripada hanya salah seorang guru yang dilatih. Menurut beberapa guru yang sudah dilatih, hasil pelatihan sulit diimplementasikan jika arah kebijakan sekolah tidak fokus pada literasi. Untuk memberikan dampak yang optimal, program juga harus mampu menyediakan pendampingan yang intensif dan dalam jangka waktu yang cukup sebagaimana yang dilakukan oleh mitra pembangunan.

Selain pemahaman mengenai prinsip pengelolaan dan pemanfaatan buku, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam program hibah buku juga perlu memahami bahwa penyediaan buku dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa apabila disertai dengan kegiatan pemanfaatan buku secara terstruktur dengan **intensitas yang tepat dan berkelanjutan** (Lihat Kotak 1). Program pemanfaatan buku juga dapat diintegrasikan ke dalam program yang terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Dalam hal ini, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik (*Teaching at the Right Level*) dapat menjadi solusi yang tepat, mengingat program buku yang disediakan sudah disesuaikan jenjang kemampuan peserta didik. *Teaching at the Right Level* (J-PAL, 2018) dapat diterapkan di sekolah dengan mengalokasikan waktu khusus untuk peserta didik untuk belajar sesuai tingkat kemampuannya. Misalnya, peserta didik kelas 3 - 5 dapat dikelompokkan sesuai kemampuan dasar mereka, dalam hal ini literasi, dan fokus mempelajari kemampuan dasar literasi selama satu sampai dua jam per hari.

Kotak 1: Mengapa diperlukan kegiatan pemanfaatan buku bacaan secara terstruktur dengan intensitas yang tepat dan berkelanjutan?

Pada tahun 2007-2009, India menerapkan program yang serupa dengan Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, bernama Program Perpustakaan Akshara (Borkum, 2012). Program ini terdiri dari peningkatan kualitas perpustakaan, penyediaan buku yang sesuai dengan usia anak dan kurikulum pendidikan, dan penyediaan petugas perpustakaan terlatih yang direkrut dari eksternal satuan pendidikan. Para petugas perpustakaan ini mengikuti beberapa sesi pelatihan terkait operasional sekolah dan kegiatan pemanfaatan buku, seperti *storytelling*, bermain peran, dan permainan-permainan lainnya.

Melalui program ini, diketahui sekitar 81% peserta didik mengunjungi perpustakaan setidaknya satu bulan sekali selama tahun ajaran. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan, para peserta didik ini juga melakukan peminjaman buku. Secara rata-rata, peserta didik mengunjungi perpustakaan 2,4 kali dan meminjam 1,3 buku dalam sebulan. ***Akan tetapi, program ini tidak berdampak terhadap kemampuan literasi peserta didik. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik hanya sesekali mengunjungi perpustakaan dan kegiatan pemanfaatan tidak dilakukan secara intensif.***

Program pemanfaatan buku bacaan secara intensif terbukti dapat memberikan dampak terhadap kemampuan literasi, namun perlu diperhatikan keberlanjutan dari program dalam jangka panjang agar dampak tidak memudar. Di Filipina (Abeberese, Dkk, 2014), Program Maraton Membaca dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Setelah program berakhir, peserta didik yang mengikuti program tersebut tercatat membaca 7,2 buku lebih banyak daripada peserta didik yang tidak mengikuti program. Selain itu, mereka juga memiliki nilai kemampuan membaca lebih tinggi (meningkat 0,13 standar deviasi).

Program Maraton Membaca yang dilakukan selama sebulan penuh terbukti dapat meningkatkan kebiasaan dan kemampuan membaca. Selama 31 hari, murid kelas 4 sekolah dasar diminta untuk membaca sebanyak mungkin buku dari 60 buku yang disediakan. Kegiatan membaca dapat berupa *storytelling*, permainan literasi, dan membaca mandiri. Meskipun demikian, dampak dari program seperti ini dalam jangka panjang cenderung memudar apabila tidak dilakukan secara terus-menerus.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). (2018). "Teaching at the Right Level to improve learning." J-PAL Evidence to Policy Case Study. Last modified August 2022.
- Abeberese, A. B., Kumler, T. J., & Linden, L. L. (2014). Improving reading skills by encouraging children to read in school: A randomized evaluation of the sa aklat sisikat reading program in the Philippines. *Journal of Human Resources*, 49(3), 611-633.
- Borkum, E., He, F., & Linden, L. L. (2012). *The effects of school libraries on language skills: Evidence from a randomized controlled trial in India* (No. w18183). National Bureau of Economic Research.
- Glewwe, P., Kremer, M., & Moulin, S. (2009). Many children left behind? Textbooks and test scores in Kenya. *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(1), 112-135.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Peluncuran Merdeka Belajar ke 23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. <https://itjen.kemdikbud.go.id>.
- Kim, J. S., & Guryan, J. (2010). The efficacy of a voluntary summer book reading intervention for low-income Latino children from language minority families. *Journal of Educational Psychology*, 102(1), 20.
- OECD. (2018). Programme for International Student Assessment (PISA): Results from PISA 2018 - Indonesia.
- Panel, G. E. E. A. (2020). Cost-Effective Approaches to Improve Global Learning. What Does Recent Evidence Tell Us Are 'Smart Buys' for Improving Learning in Low-and Middle-Income Countries?. *World Bank*. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/719211603835247448/pdf/Cost-Effective-Approaches-to-Improve-Global-Learning-What-Does-Recent-Evidence-Tell-Us-Are-Smart-Buys-for-Improving-Learning-in-Low-and-Middle-Income-Countries.pdf>.
- Holden, K. L. (2016). Buy the book? Evidence on the effect of textbook funding on school-level achievement. *American Economic Journal: Applied Economics*, 8(4), 100-127.
- Pusat Perbukuan, BSKAP. (2023). Matriks perjenjangan buku. Jakarta.
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP. (2023). Analisis data rapor pendidikan.
- Sabarwal, S., Evans, D., & Marshak, A. (2014). The permanent input hypothesis: the case of textbooks and (no) student learning in Sierra Leone. *World Bank Policy Research Working Paper*, (7021).
- Setiawan, R. (2022). Modul 4 membaca nyaring: peningkatan mutu fasilitator pendampingan buku bacaan literasi dan modul literasi numerasi.

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari
kajian yang dilakukan oleh
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

**Indah Pratiwi
Lisnawati
Bakti Utama
Ika Hijriani**